

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aceh merupakan daerah paling ujung barat dari wilayah Indonesia. Daerah ini menyimpan berbagai misteri yang sampai saat ini banyak dikaji oleh para peneliti. Dalam sejarah, kedatangan Islam ini telah menghasilkan beberapa karya yang komprehensif dan mendapatkan julukan Serambi Mekah. Kehidupan masyarakat Aceh selalu diwarnai dengan nilai-nilai Islam, corak kehidupan seperti ini adalah sebuah keinginan dimana hal tersebut pernah terjadi saat Aceh masih berdaulat kerajaan pada zaman Belanda. Dan kemudian kerajaan Aceh juga runtuh ketika bergabung dengan kesatuan Republik Indonesia, konsekuensi hukum Islam yang berlakupun diseragamkan dengan hukum sekuler yang merupakan adopsi dari hukum bangsa Belanda.

Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Aceh dinyatakan sebagai bagian dari Indonesia, para ulama Aceh umumnya dan ulama yang tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) khususnya berupaya agar Daerah Istimewa Aceh dapat menjalankan Syari'at Islam,¹ sebagaimana yang pernah dijalankan pada masa jayanya kerajaan Aceh dibawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Namun upaya tersebut tidak mendapat respon positif dari Pemerintah Pusat, bahkan pemerintah pusat berusaha meleburkan Daerah Istimewa Aceh ke Sumatera Utara. Sehingga lahir

¹ Abdul Aziz Dahlan 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta. Ichtiar Van Hoeve, hlm. 334.

pergerakan apa yang dinamakan DI/TII dibawah pimpinan Tgk. M. Daud Beureueh pada tahun 1953 yang bertujuan menerapkan Syari'at Islam di Aceh.

Pada dasarnya keinginan rakyat Aceh untuk tetap memberlakukan Syari'at Islam pasca kemerdekaan tetap ada, bahkan pada saat itu Soekarno sendiri pernah berjanji memberikan hak kepada rakyat Aceh untuk melaksanakan Syari'at Islam di Aceh. Hal tersebut tertuang dalam dialog Soekarno dengan Daud Beureueh, kala itu Daud Beureueh meminta kepada Soekarno agar kepada rakyat Aceh diberikan kebebasan untuk menjalankan Syari'at Islam didaerahnya, dan Soekarno menyetujui permohonan tersebut dengan alasan 90 persen rakyat Indonesia pun beragama Islam. Akan tetapi, kemudian Soekarno mengingkari janjinya. Dalam pidatonya di Amuntai ia menyatakan tidak menyukai lahirnya negara Islam dari Republik Indonesia², yang itu juga berimplikasi kepada tidak dibolehkannya daerah Aceh untuk melaksanakan Syari'at Islam.

Melihat kondisi yang semakin tidak menentu kemudian pemerintah pusat mengirim sebuah misi ke Aceh yang dikenal dengan misi Hardi pada tahun 1959 dengan tujuan menyelesaikan konflik antara pemerintah pusat dengan gerakan DI/TII di Aceh. Setelah melewati berbagai macam dialog yang puncaknya terjadi pada tanggal 25 Mei 1959, Misi Hardi inipun dianggap berhasil, ditandai dengan diberikannya peningkatan status provinsi Aceh menjadi Daerah Istimewa Aceh, dengan hak-hak otonomi yang luas dalam bidang agama Islam, Pendidikan, dan Adat Istiadat.

Akan tetapi pemberian otonomi tersebut tidaklah serius dilakukan oleh pemerintah pusat, ini dibuktikan dengan tidak diberikannya kewenangan kepada

² Syarifudin Tippe, *Aceh Dipersimpangan Jalan*, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000), hlm 10

Aceh untuk membuat perangkat undang-undang yang memadai dan mendukung terlaksananya keistimewaan dalam hal penerapan Syari'at Islam, oleh karena itu tidaklah mengherankan kalau seandainya pelaksanaan Syari'at Islam sebagaimana yang diharapkan masyarakat Aceh tidak dapat terealisasi.

Kekecewaan masyarakat Aceh terhadap sikap pemerintah pusat yang dianggap tidak serius dalam memberikan keistimewaan kepada daerah Aceh memicu timbulnya konflik-konflik baru ditengah masyarakat seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang kesemuanya itu menginginkan diberlakukannya Syari'at Islam di Aceh, akibat dari lambannya penanganan pemerintah pusat terhadap masalah tersebut keinginan sebagian rakyat Aceh pun berkembang menjadi tuntutan merdeka.

Melihat ancaman disintegrasi bangsa tersebut pemerintah pusat kemudian kembali menawarkan sebuah solusi terhadap penyelesaian kasus Aceh yang berkepanjangan, dan solusi yang diambil oleh pemerintah pusat adalah disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Keistimewaan Profinsi Nanggroe Aceh Darussalam menjadi Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2000 oleh DPRD Aceh tentang pelaksanaan Syari'at Islam.

Syari'at Islam yang menjadi dambaan masyarakat Aceh kini telah berjalan dibumi Serambi Mekah, pemerintah secara yuridis telah memberikan wewenang penuh kepada Pemerintah Aceh untuk menentukan sendiri jalannya pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan syari'at Islam.

Pada saat ini Aceh telah menyusun beberapa *Qanun* yang mengatur tentang pelaksanaan syari'at Islam, antara lain: *Qanun* Provinsi Aceh No. 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat³ yang diantaranya adalah peraturan tentang *Khamar* (Minuman Keras), *Maisir* (Judi) dan *Khalwat* (Zina) . Salah satu bentuk metode hukuman yang disebutkan didalam setiap *Qanun* tersebut diatas yakni hukuman cambuk⁴. Hal ini senada dengan keinginan dan keadaan kultur masyarakat Aceh. Dalam kehidupan sehari-hari, pola tingkah laku masyarakat Aceh bisa dikatakan mencerminkan hukum Islam, artinya sesuai dengan aturan hukum Islam. Dalam sejarah yang panjang, masyarakat Aceh telah menempatkan hukum Islam sebagai pedoman hidupnya dalam segala bentuk kekurangan dan kelebihanannya. Penghayatan terhadap hukum Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat.

Hukum dan adat itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan didalam kehidupan rakyat Aceh, keberhasilan syariat bukan hanya diukur dari berapa banyak jumlah pelanggar yang dicambuk, berapa qanun yang sudah dihasilkan, atau masih ada atau tidak pelanggaran. Tetapi keberhasilan syariat yang paling penting adalah kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang berbau kriminalitas. Kesadaran masyarakat merupakan bentuk kepatuhan masyarakat terhadap aturan qanun yang mereka aplikasikan kedalam pola kehidupan, pergaulan dan tingkah laku mereka sehari-hari. Jadi, syariat juga memerlukan pendekatan

³ Qanun merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh, lihat Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

⁴ Mohd. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional dari Aceh Untuk Indonesia*, (Bandung: Unpad Press, 2009), hlm. 9.

rasio yang memadai, bukan hanya mengedepankan dorongan emosional keagamaan.

Perlu adanya pemikiran yang responsive terhadap nilai hukum dan pola tingkah laku masyarakat, agar hukum tidak dipandang kaku akan tetapi lentur sesuai dengan nilai fakta dan realitas sosial masyarakat. Artinya qanun itu tidak hanya manifestasi dari aturan dasar syari'at yang mesti kita laksanakan akan tetapi juga harus merupakan manifestasi dari masyarakat Aceh. Jika kita hanya memandang qanun sebagai aturan syari'at yang mesti kita laksanakan dengan mengabaikan fakta dan realitas yang ada dimasyarakat maka dapat dipastikan qanun itu akan berjalan ke arah yang berbeda dengan masyarakat. Akibatnya, dengan tidak adanya kesesuaian antara hukum atau qanun dengan masyarakat, menyebabkan tidak berjalannya aturan qanun seperti yang diharapkan dan dicita-citakan. Hukum itu harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, bahwa memulai Syari'at bukan dari Rajam⁵.

Dengan pemahaman bahwa hukum merupakan suatu aturan yang hidup di dalam masyarakat (*living law*). Maka hukum (dalam hal ini *Qanun*) yang baik dalam proses pembuatannya harus melihat dari bawah atau dari pandangan adat masyarakat itu sendiri. Karena awal terealisasinya syari'at Islam itu berdasarkan keinginan dari masyarakat dan ini merupakan fenomena sosial, maka tidak relevan jika dalam pembuatan aturan syari'at (*Qanun*) mengabaikan pandangan masyarakat. Demikian juga dengan aturan qanun yang menerapkan hukuman

⁵ Edwin M. Schur (ed.), *Law and Society a Sociologycal View* dalam *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2001), hlm. 102.

dengan metode cambuk bagi masyarakat, tidak hanya sebatas pelaksanaan dari aturan *Qanun* itu, akan terlihat tidak efektif atau bahkan terkesan *Qanun* itu berjalan ditempat.

Bentuk hukuman cambuk ini merupakan bentuk penghukuman baru didalam perundangan Indonesia yang diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan atau pelanggaran syari'at di Aceh. Maka tidak jarang timbul perbedaan pandangan dimasyarakat terkait dengan pelaksanaan hukuman cambuk, baik itu dilihat dari segi *Qanun* (Peraturan daerah) itu sendiri ataupun dilihat dari Hukum Adat setempat. Perbedaan pandangan ini telah terjadi semenjak *Qanun* masih dalam rancangan sampai sekarang.

Ada sebahagian orang yang mendukung terlaksananya hukuman cambuk, ada kelompok lain yang secara terang-terangan menentang pelaksanaan hukuman cambuk seperti yang dilakukan oleh Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan (*kontras*) baik di Aceh Maupun di Jakarta⁶, apakah hukuman kurungan badan dan penjara dalam sistem hukum pidana tidak begitu menjadi shock terapi bagi para pelaku tindak pidana? atau masyarakat yang tidak mengerti tentang pelaksanaan hukuman cambuk. Berbagai macam reaksi muncul di dalam masyarakat terhadap cambuk yang dijadikan sebagai alat pelaksanaan hukuman. Semakin banyaknya terjadi pro dan kontra dari berbagai pihak khususnya kritikan-kritikan dari masyarakat luar yang cenderung lebih kontra, hal itu sangat mempengaruhi berubahnya pola fikir masyarakat Aceh dalam memaknai dan mengikuti berjalannya sistem hukum yang berlaku.

⁶ . Subakti natangsa, *Pidana Cambuk dalam Prespektif Keadilan Hukum dan Hak Assasi Manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam* : Jurnal hukum No.3 Vol 17 2010

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa terdorong dan tertarik untuk meneliti tentang ***Pergeseran Makna Tradisi Hukum Cambuk Pada Masyarakat Aceh.***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian dan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah:

Bagaimana pergeseran makna tradisi hukum cambuk yang terjadi pada masyarakat Aceh?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui bagaimana pergeseran makna tradisi hukum cambuk yang terjadi pada masyarakat Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Teoritis

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan, khususnya bagi pemerintah provinsi Aceh, dalam hal ini Dinas syari'at Islam, Majelis Adat Aceh, dan Wilayatul Hisbah (WH) tentang bagaimana pergeseran makna hukum cambuk pada masyarakat Aceh. Sehingga dapat dijadikan dasar dalam mengambil kebijakan dalam penerapan syari'at Islam di Aceh.
2. penelitian ini diharapkan dapat lebih membangun sikap masyarakat untur lebih sadar atas hukum syariat yang berlaku di aceh.

3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan meningkatkan praktik yang sudah berjalan.
4. Menjadi tambahan referensi bagi dunia akademik khususnya ilmu Sosiologi.

Praktis:

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai Bagaimana pergeseran makna tradisi hukum cambuk pada masyarakat Aceh.

2. Bagi Lembaga Pendidikan

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan tambahan referensi untuk mahasiswa dalam penelitian tentang Bagaimana pergeseran makna tradisi hukum cambuk pada masyarakat Aceh.

1.5 . Definisi Konsep

1. Makna

Makna adalah balasan terhadap pesan. Suatu pesan terdiri dari tanda-tanda dan simbol-simbol yang sebenarnya tidak mengandung makna. Makna baru akan timbul, ketika ada seseorang yang menafsirkan tanda dan simbol yang bersangkutan dan berusaha memahami artinya.⁷

2. Tradisi

⁷ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi (Suatu Pengantar)*, (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2010) hlm :92

Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.⁸

2. Masyarakat

Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.⁹

3. Hukum cambuk.

Hukuman cambuk berasal dari dua kata yaitu hukuman dan cambuk, yang dimaksud dengan hukuman adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya, keputusan yang dijatuhkan oleh hakim. Sedangkan cambuk adalah suatu alat pemukul yang berdiameter antara 0,75cm sampai 1cm (satu) sentimeter, dengan panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda atau dibelah.¹⁰

1.6. Metode Penelitian

penelitian merupakan bentuk aktivitas ilmiah untuk mengamati,

⁸ . Nurhakim, Moh. 2003. *Islam, Tradisi dan Reformasi* . Malang. UMM press. Hlm :29

⁹ Soekanto, Suryono 2006. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada. hlm : 22

¹⁰ . <http://dtyadevevim.blogspot.co.id/2016/03/istinbath-hukuman-cambuk-atau-rajam.html?m=1> , Istibat Hukuman Cambuk atau Rajam bagi pezina, Destantya Devi Masita. Di akses pada tanggal 5 oktober 2016 pukul 14:32

melihat, mencari, menggali data atau informasi secara ilmiah, yang dilakukan oleh ilmuwan. Adapun ciri-ciri ilmiah yaitu : rasional, sistematis, objektif, dan realistis. Sedangkan metode adalah suatu cara yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pekerjaan. Metode penelitian mempunyai peran yang penting dalam melakukan suatu pekerjaan. Metode penelitian mempunyai peran yang penting dalam pengumpulan data, merumuskan masalah, analisis dan interpretasi data. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan, karena pemilihan metode penelitian secara garis besarnya dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian metode yang akan digunakan tersebut dengan obyek yang akan diteliti.¹¹

1.7 Pendekatan dan Jenis Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang bertujuan untuk memahami objek dan membuat eksplorasi atau gambaran tentang masalah yang diteliti. Sedangkan Jenis penelitian menggunakan metode Deskriptif Kualitatif.¹² Dimana penelitian diarahkan untuk memahami dan memberikan gambaran dan informasi yang akurat mengenai bagaimana pergeseran makna tradisi hukum cambuk pada masyarakat Aceh di Desa Sidodadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

1.8 Lokasi Penelitian

¹¹ . Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat Jakarta : Gramedia, 1991, hlm 7-8

¹² . Creswell, S. John 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset (memilih diantara lima pendekatan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar hlm:167

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sidodadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, dengan jumlah penduduk 515 jiwa yang terdiri dari 170 kepala Keluarga 259 laki-laki dan 256 perempuan. Alasan dipilihnya lokasi ini karena hukum cambuk juga berlaku di daerah ini. Sehingga dapat mempermudah peneliti dalam memperoleh informasi mengenai bagaimana pergeseran makna tradisi hukum cambuk pada masyarakat Aceh.

1.9 Tahapan Penelitian

Penelitian ini memiliki tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya. Antara lain dimulai dengan penentuan topik penelitian : penulisan proposal; seminar proposal; tahapan penelitian; pralapangan; tahap turun lapang; analisa data dan penyusunan laporan hasil; serta diakhiri dengan seminar hasil penelitian.

a. Tahap 1: Penentuan Topik Penelitian

Tahap ini dimulai ketika peneliti mencari permasalahan yang sedang menjadi perhatian publik khususnya di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Dari berbagai topik permasalahan yang ada, banyaknya masyarakat yang pro dan kontra terhadap pelaksanaan hukum cambuk pada saat ini, peneliti akhirnya memutuskan untuk mengambil topik ini dalam penelitian yang akan peneliti lakukan.

b. Tahap 2 : Penulisan Proposal

seperti pada umumnya penelitian, penulisan proposal menjadi hal yang wajib dilakukan oleh peneliti. Proposal secara umum menuliskan rencana

penelitian melalui dari latar belakang masalah hingga metode apa yang akan digunakan dalam penelitian.

c. Tahap 3 : Seminar Proposal

pasca penulisan proposal selesai, maka tahap selanjutnya dalam penelitian ini adalah menyeminarkan proposal, seminar proposal merupakan prosedur wajib dalam sebuah penelitian, sebelum penelitian dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menginformasikan kepada publik jika akan dilakukan sebuah penelitian, dan pada seminar proposal inilah, publik bisa memberikan masukan maupun kritik agar penelitian yang akan dilakukan bisa berjalan dengan baik.

d. Tahap 4 : Tahapan penelitian

Tahap ini lebih kepada tahapan secara administratif, seperti membuat surat ijin penelitian dari fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang yang diajukan kepada Kesbangpol Kabupaten Bener Meriah. Dari Kesbangpol, surat ijin kemudian diteruskan kepada Kepala Desa Sidodadi, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah.

e. Tahap 5 : Tahapan Pralapangan

Tahap ini merupakan tahap dimana peneliti menyusun teknis penelitian, seperti menyiapkan bahan penelitian seperti kamera, *tape recorder*, bolpoin dan kertas. Selain itu juga menyiapkan instrumen penelitian berupa daftar

pertanyaan yang akan ditanyakan dalam proses wawancara karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur.

f. Tahap 6 : Tahap Turun Lapang

Tahapan ini tak lain adalah tahapan inti dalam penelitian. Tahapan dimana data penelitian digali dari para informan. Tahapan ini dilakukan dengan mewawancarai para informan dan mencari data-data sekunder mulai dari Kantor desa Sidodadi sampai dengan Lembaga Wilayatul Hisbah.

g. Tahap Analisa Data dan Penyusunan Laporan Hasil

Pasca turun lapang dan data telah dikumpulkan maka tahap selanjutnya adalah tahapan analisa data, validitas data, dan penyusunan laporan hasil penelitian. Tahapan ini juga merupakan proses penting dalam penelitian karena dari tahapan inilah data dari hasil lapangan dapat dijelaskan dalam bentuk deskriptif.

h. Tahap Seminar Hasil Penelitian

Tahap ini merupakan akhir dari rangkaian proses penelitian dengan mempersentasikan hasil penelitian kepada publik.

1.10 Subyek Penelitian

Salah satu aktivitas dalam proses pengumpulan data adalah menentukan subyek penelitiannya. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan informan, sebab dari merekalah diharapkan informasi dapat

terkumpul sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Subyek penelitian menurut Amirin (1986) adalah seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.¹³ diajukan. Subyek penelitian menurut Amirin (1986) adalah seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *Purposive sampling* yaitu atas dasar pertimbangan tertentu, kemudian menentukan kriteria informan atau subjek penelitian yang dianggap memiliki kecakapan informasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data *purposive sampling* agar tidak terjadi pelebaran atau dapat dikatakan agar pernyataan dan data yang diberikan sesuai dengan tujuan peneliti. Adapun informan yang dipilih sebagai berikut:

1. Orang yang pernah dihukum cambuk
2. Keluarga dari orang-orang yang pernah dihukum cambuk
3. Tokoh Adat, tokoh adat sebagai orang yang lebih tau tentang tradisi hukum cambuk di Aceh.
4. Tokoh Agama (*Teuku*), sebagai seseorang yang mempunyai peran penting dalam menjalankan tradisi hukum cambuk
5. Masyarakat, selain tokoh masyarakat, informasi dari masyarakat umum sangat diperlukan. Karena masyarakat umum adalah bagian

¹³ . Muhammad Idrus.2009. *Penelitian Ilmu Sosial : Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* : Edisi Kedua. Jakarta: Erlangga.Hlm: 36

dari struktur sosial paling utama yang dikontrol oleh hukum cambuk yang berlaku di Aceh.

1.11 Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data langsung dari sumber yang diteliti, yakni wawancara langsung dan observasi langsung dilokasi penelitian kepada masyarakat yang nantinya terpilih menjadi subyek, karena dengan teknik probabilitas semua anggota populasi mendapat kesempatan yang sama dalam memberikan data dan informasi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh dari literatur yang dipelajari serta dokumen-dokumen atau arsip, dan beberapa literatur di internet yang memuat terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti juga menggunakan data sekunder sebagai faktor pendukung dari data primer yang di dapat dari masyarakat sehingga data yang diperoleh lebih sempurna dengan bantuan data sekunder. Data sekunder tersebut berupa hasil penelitian terdahulu, dan media online seperti berita, foto maupun video mengenai hukum cambuk di Aceh.

1.12 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Metode ini dipakai untuk mendapatkan data melalui kegiatan melihat, mendengar dan penginderaan lainnya yang mungkin dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan.¹⁴ Dalam proses observasi ini, peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melihat kondisi ril di lingkungan masyarakat yang diteliti dengan cara melihat dan mengamati kondisi sosial yang ada, serta bagaimana masyarakat memaknai tradisi hukum cambuk di Aceh.

b. Wawancara

Metode wawancara atau metode interview adalah cara yang digunakan seseorang untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari informan dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut.¹⁵

Salah satu kelebihan yang dimiliki wawancara adalah pewawancara sebagai pengumpul data dapat melakukan kontak langsung dengan subyek yang akan dimintai keterangan sehingga diperoleh data atau informasi yang lebih lengkap dan mendalam.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan wawancara terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan

¹⁴. Arikunto, Suharsimi. 1997. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka, hlm: 146

¹⁵. Koentjaraningrat. 1986. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, hlm : 129

yang sudah disiapkan sebelumnya. Wawancara terpimpin seringkali disebut juga sebagai wawancara terstruktur

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam hal ini berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data yang bersumber dari catatan, agenda, buku/pustaka, peraturan-peraturan tertulis, serta merekam hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dalam teknik dokumentasi data-data yang diperoleh adalah berupa gambar dan tulisan. Teknik dokumentasi ini digali dengan maksud untuk melengkapi data yang diperoleh sebelumnya. Alasan menggunakan teknik dokumentasi adalah sebagai pelengkap data yang tidak didapat dari teknik sebelumnya.

1.13. Teknik Analisis Data.

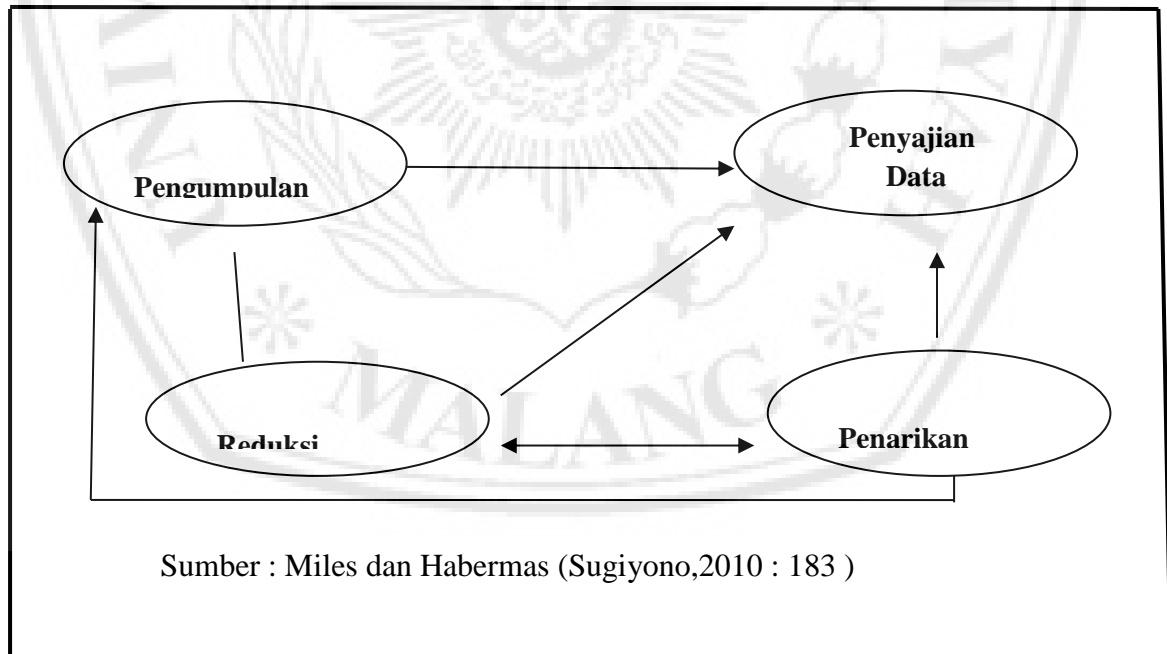
Dalam penelitian ini teknik analisa data yang digunakan peneliti adalah teknik analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai sumber informasi dan data kemudian digeneralisasikan. Analisis data merupakan langkah terakhir sebelum didapatkan satu kesimpulan. Oleh karena itu teknik analisis data diperlukan dalam penelitian guna memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang objek yang diteliti. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif.¹⁶

¹⁶ . Creswell.S. John 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset (memilih diantara lima pendekatan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar hal:220

Setelah data di analisis dengan metode deskriptif kualitatif selanjutnya akan membahas permasalahan sampai pada penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif model tersebut interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Heberman melalui empat tahapan. Komponen-komponen Analisis data model interaktif¹⁷

Miles dan Haberman (1984) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Hingga sampai pada data yang jenuh aktivitas dalam analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Tabel. 1
Skema alur aktivitas analisis kualitatif



1. Pengumpulan Data

¹⁷ . Sugiyono.2010.*Metode Penelitian Kualitatif dan RND*.Bandung.Alfabeta.hal : 183

Kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari subyek penelitian yang ada relevansinya dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam pengumpulan data ini peneliti mengumpulkan data yang terkait dengan judul penelitian.

2. Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, keabstrakan dan transformasi data awal yang muncul dari catatan lapangan. Peneliti mengedit data dengan cara memilih bagian data untuk dikode, dipakai dan diringkas serta dimasukkan dalam kategori yang diteliti, Reduksi data dilakukan secara terus menerus selama penelitian dilakukan.

3. Penyajian Data

Sekumpulan data yang diorganisir sehingga dapat memberi deskripsi menuju penarikan kesimpulan. Penyajian data harus mempunyai relevansi yang kuat dengan perumusan masalah secara keseluruhan dan disajikan secara sistematis.

4. Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan merupakan bagian penting dari kegiatan penelitian karena merupakan kesimpulan dari penelitian. Proses penarikan kesimpulan ini bermaksud untuk menganalisis, mencari makna dari data yang ada sehingga dapat ditemukan permasalahan apa yang ada dalam penelitian yang telah dilakukan.

1.14 Uji Keabsahan Data

Validitas data merupakan persesuaian antara data yang ada pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan. Dengan demikian, data yang valid merupakan data yang tidak berbeda dengan data yang sebenarnya dan yang dilaporkan oleh peneliti dari objek penelitian. Maka, temuan-temuan yang dapat dikatakan valid apabila data yang dilaporkan sesuai dengan data yang ada pada objek penelitian.¹⁸

Pengujian kredibilitas data dalam penelitian ini dapat dilihat sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Sugiyono, antara lain dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, dan *member check*.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dalam penelitian kualitatif berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

b. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

¹⁸ . Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta Hlm : 338

Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak.

c. Trianggulasi

Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat trianggulasi sumber, trianggulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

1. Trianggulasi sumber

Trianggulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Trianggulasi Teknik

Trianggulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Trianggulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang telah dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

d. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan

dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan.

e. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto

f. Mengadakan *Member Check*

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga semakin kredibel atau dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan tidak disepakati oleh para pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan para pemberi data, dan apabila perbedaanya tajam, maka peneliti harus mengubah temuannya dan harus menyesuaikan dengan apa yang telah diberikan oleh pemberi data.¹⁹

¹⁹ . Ibid Hlm : 368